

PENGARUH SARANA DAN PRASARANA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMEDANG

Irma Hermayanty

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: irmaharyanty@gmail.com

ABSTRACT. The purpose of research that researchers do is to determine the effect of facilities and infrastructure on the effectiveness of employees in the Office of Population Control and Family Planning Sumedang District and to determine the relationship between facilities and infrastructure with the effectiveness of employees in the Office of Population and Family Planning Sumedang District. The method used in this study is a quantitative research method which is used in research based on positivism philosophy with the aim to test the hypothesis that has been set. In this study researchers used inferential descriptive data analysis techniques describe or describe the data that has been collected as is by making conclusions that apply to the public. The sampling technique used in this study is the technique of proportional stratified random sampling, with a population of 36 people then the researchers used the Slovin formula to obtain the sample to 26 respondents. Based on the results of the study, research can illustrate that the procurement of facilities and infrastructure carried out by the Department of Population and Family Planning Sumedang District has reached 69.42% and the numbers are categorized Good, as well as with the effectiveness of employees of the Office of Population Control and Family Planning Sumedang District reached 70.77% and the numbers are categorized Good. The relationship of facilities and infrastructure with the effectiveness of employees of the Office of Population Control and Family Planning Sumedang District with a correlation coefficient of 0.993 is in the category very strong. While the influence of facilities and infrastructure to the effectiveness of employees of the Office of Population Control and Family Planning Sumedang District reached 98.6% of the rest of 1.4% influenced by other factors not investigated by researchers called the epsilon factor.

Keywords: Facilities and Infrastructure, Employee Effectiveness

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;

1. Bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja.

2. Bahwa standarisasi ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di jajaran departemen dalam negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 khususnya untuk Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai lagi untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah.

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti modal dan sarana prasarana kantor. Manusia merupakan sumber daya yang penting bagi lembaga, karena manusia memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama, menyusun tujuan, dan bekerja untuk mencapai tujuan. Tidak kalah pentingnya sarana dan prasarana kantor yang ada di suatu lembaga juga mempunyai pengaruh besar dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Oleh karena itu, dalam suatu lembaga membutuhkan sarana dan prasarana kantor yang dapat memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya agar penyelenggaraan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional lainnya dapat berjalan dengan lancar.

Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) di Kabupaten Sumedang belum optimal. Salah satunya yaitu sarana kantor yang digunakan belum memadai. Selain itu, prasarana kantor seperti komputer belum tersedia di tiap meja kerja pegawai dan kamar mandi juga masih kurang terawat.

Efektivitas kerja pegawai tentunya selain dimotivasi dalam diri pegawai juga menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Dengan demikian Efektivitas Kerja pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam suatu organisasi, karena suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Artinya tujuan organisasi tidak akan tercapai dengan baik tanpa ditunjang oleh para pegawai yang bekerja secara efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Kerja pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang dengan gejala indikasi masalah adalah pengabsenan masih manual hal ini dibuktikan dengan *fringerprint* yang rusak, sehingga ada kecurangan manipulasi data. Pengerjaan tugas yang lambat dengan adanya waktu menunggu giliran kerja karena keterbatasan sarana dan prasarana. Pemanfaatan waktu kerja yang belum maksimal masih terdapat pegawai yang datang tidak tepat waktu.

Berdasarkan penemuan tersebut, penulis menduga bahwa, semua itu karena masih lemahnya pengadaan Sarana dan Prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumedang, hal ini dapat dilihat dari tata ruang kantor kurang memadai, hal ini dibuktikan dengan letak meja yang terlalu dekat dan tidak ada sekat penghalang. Lokasi pelaksanaan apel sempit dibuktikan dengan pelaksanaan apel masih satu tempat dengan lokasi parkir kendaraan, sehingga tidak nampak adanya lokasi khusus untuk melaksanakan apel. Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dengan tidak tersedianya komputer di tiap-tiap meja pegawai, sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan kerja pegawai.

TINJAUAN PUSTAKA

Sarana dan Prasarana

Menurut Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyyati (2010:43) menyatakan bahwa "Sarana kantor adalah benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin". Sedangkan Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyyati (2010:43) menyatakan bahwa "Prasarana kantor adalah benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan tanah."

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana

adalah seperangkat alat yang dapat digunakan dalam suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran dan penyimpanan. Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya yaitu sarana berupa benda-benda yang bergerak sedangkan prasarana berupa benda-benda yang tidak bergerak.

Efektivitas Kerja

Berbicara masalah efektivitas, Gibson dalam Handyaningrat (1996:15) mengemukakan bahwa "*Effectiveness is a measuring is term of attaining prescribed goals or objectives*". (efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya).

Pendapat lain di kemukakan oleh siagian (2004:151), yaitu :

"Efektivitas berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah di tetapkan. Artinya, apakah pelaku pelaksanaan suatu tugas di nilai baik atau tidak sangat bergantung pada bilamana tugas itu di selesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang di dikeluarkan untuk itu".

Pandangan mengenai pengertian aktivitas sangat beragam, dengan demikian jika di lihat lebih jauh pandangan pangan mengenai efektivitas di dasarkan pada hasil akhir tujuan yang di capai organisasi.

Menurut Westra yang di kutip Iskandar (2005:331) mengemukakan bahwa :

"Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek atau akibat yang di kehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang di kehendaki, maka orang itu di

katakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendaki".

Pandangan Emerson dalam Handyaningrat (1996:109) menyatakan bahwa:

"Efektivitas itu ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya". Efektivitas sering di tinjau dari sudut out put dalam suatu organisasi. Demikian pula pada waktu meneliti perilaku pekerjaan dalam suatu organisasi, maka beberapa persoalan yang utama mengancam menghalangi usaha manajemen meningkatkan efektivitas kerja.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan efektivitas yaitu suatu pekerjaan yang tepat waktu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2001:112) yang di maksud dengan deskriptif analisis adalah sebagai berikut:

"Metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung melalui proses pengumpulan, penyusunan dan penjelasan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan teori yang ada".

Metode deskriptif analisis menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian, dengan cara mengumpulkan data, menyusun data kemudian mengolahnya dan menganalisisnya secara kuantitatif sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan keberadaan variabel - variabel secara faktual, serta hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya.

Penggunaan metode deskriptif analisis ini dianggap cukup relevan dengan permasalahan penelitian, karena dalam penelitian ini peneliti berupaya mencari penjelasan tentang variabel - variabel dan hubungan antar variabel yang menjadi masalah penelitian. Sugiono (2002:10) mengatakan bahwa:

“Tingkat eksplanasi (*level of explanation*) adalah tingkat penjelasan, jadi penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjalankan kedudukan dua variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain”.

Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan mampu mengungkap fenomena yang dikaji secara sistematis untuk mendapatkan kebenaran dari permasalahan yang diteliti. Yaitu dengan melihat bagaimana kedudukan variabel bebas dan variabel terikat, bagaimana hubungan dan atau pengaruh diantara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang.

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disingkat DPPKB Kabupaten Sumedang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut DPPKB kabupaten Sumedang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Langkah awal dalam formulasi strategi sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*Future*) yang realistis atas cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.

Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dan organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi

semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi.

Atas dasar pengertian sebagaimana tersebut diatas dan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 yaitu " *Sumedang Senyum Manis* " (*Sejahtera Nyunda Maju Mandiri Agamis*), maka untuk periode 2014 - 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang menetapkan dan melanjutkan visi BPMPDKBPP sebelum perubahan SOTK baru yaitu: " *Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Keluarga Kecil Sejahtera Menuju Kemandirian Desa pada Tahun 2018* "

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, penyebaran angket, peninjauan langsung ke lapangan dan menganalisis serta menguakikan secara sistematis perhitungan butir-butir angket, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang sudah dapat dikatakan baik. Hal ini diperoleh berdasarkan pada hasil perhitungan total skor angket yang mencapai 69,42% (kriteria baik).
2. Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang sudah dapat dikatakan baik. Hal ini diperoleh berdasarkan pada hasil perhitungan total skor angket yang mencapai 70,77% (kriteria baik).
3. Hubungan antara Sarana dan Prasarana dengan Efektivitas Kerja Pegawai berada pada tingkat korelasi sangat kuat dengan koefisien korelasi 0,993.

4. Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang sangat tinggi. Dengan koefisien determinasi sebesar 98,6%. Dengan demikian Ho yang berbunyi " *tidak terdapat pengaruh antara Sarana dan Prasarana dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang.* " **ditolak**, sedangkan Ha yang berbunyi " *terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Sarana dan Prasarana dengan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten sumedang.* " **diterima**.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan dalam dekorasi yang merupakan bagian dari dimensi kondisi fisik dalam variabel Sarana dan Prasarana, karena berdasarkan hasil perhitungan presentase per-indikator, indikator dekorasi memiliki presentase terendah jika dibandingkan dengan indikator variabel Sarana dan Prasarana lainnya, yaitu sebesar 62,30%.
2. Perlu diperhatikan kembali mengenai indikator suara pada dimensi lingkungan dalam menunjang Efektivitas Kerja Pegawai, karena berdasarkan hasil perhitungan presentase per-indikator, indikator dekorasi memiliki presentase terendah jika dibandingkan dengan indikator variabel Efektivitas Kerja Pegawai lainnya, yaitu sebesar 60,77%.
3. Untuk meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang, maka perlu adanya pengadaan Sarana dan

Prasarana yang baik. Sehingga diharapkan Efektivitas Kerja Pegawai dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2005). *Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah*. Bandung. CV Maulana.
- Atmosudirjo. Prajudi, (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Dassler. Garry. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Indeks. Kelompok Gramedia.
- Handayani. Soewarno. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung.
- Iskandar. Jusman. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga
- Juni. Doni G dan Garnida. Agus (2013). *Manajemen Perkantoran. Efektif. Efisien dan Profesional*. Bandung. Alfabeta.
- LAN RI. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta Perum Percetakan Negara RI.
- Mintorog, Antonius. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta. STIA LAN.
- Rosjidi. (1994). *Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah*. Bandung. CV Dipenogoro.
- Rue. Reslie. (2009). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Sakti.
- Siagian. Sondang P. (2014). *Filsafat Administrasi*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Silalahi. Ulbert. (2009). *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung Sinar Baru Algesindo.
- Siagian. Sondang P (1997). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sulistiyani. Ambar Teguh dan Rosidah (2003). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Terry. George. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta Bumi Aksara.
- Thoha. Miftaf. (2002). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Administrasi Negara*. Yogyakarta. UGM.
- STIA Sebelas April. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sumedang. STIA Sebelas April Sumedang.
- Umam. Khaerul. (20014). *Manajemen Perkantoran*, Bandung. Pustaka Setia.